ABSTRAK

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PERUMUSAN PERATURAN DAERAH DI WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
(Studi Pada DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Oleh:

Cecep Ramdani

Posisi perempuan yang selama ini cenderung menjadi objek dari pada subjek dalam pembangunan nasional. perempuan tidak diberi ruang untuk berperan dan berpartisipasi dalam wilayah publik apalagi berperan dan berpartisipasi dalam wilayah politik praktis dan bahkan cenderung diabaikan atau bahkan dipinggirkan.

Hal di atas akan memunculkan persoalan jika budaya patriarkhi terus menerus dipegang teguh oleh para elit, baik dari pemerintahan maupun elite-elit partai politik, sehingga membuat ruang partisipasi bagi perempuan semakin sempit. Ditengah semakin digalakannya peran-peran perempuan dalam semua lini membuat persoalan - persoalan yang menjadi hambatan bagi partisipasi perempuan terus diperangi demi tumbuhnya partsisipasi perempuan husunya di DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam proses perumusan peraturan daerah. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mngetahui partisipasi perempuan

anggota DPRD dalam perumusan peraturan derah diwilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian mengenai partisipasi perempuan dalam perumusan peraturan daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat cukup baik yaitu dengan ikut terlibat secara aktif dalam proses penyusunan produk hukum. Keterlibatan mereka apabila dihubungkan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai anggota legislatif dapat dikategorikan selaras dalam beban tanggung jawab yang mereka emban, baik tanggung jawab secara hukum maupun moral. Selain itu, partisipasi perempuan sebagai anggota legislatif juga dapat dilihat dari tingkat kemampuan perempuan sebagai anggota DPRD dalam penyerapan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah cukup mampu juga, tidak ada perbedaan yang mencolok antara laki-laki dan perempuan karena diberikan hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dalam melaksanakan tugasnya.

Kata Kunci : Partisipasi, Perempuan, Peraturan Daerah